



UNIVERSITAS  
AIRLANGGA  
FAKULTAS HUKUM

P-ISSN 2721-8392  
E-ISSN 2655-8297

Vol. 6 No. 1, Januari 2023

# Jurist-Diction

*Law Journal*

- ◆ KEABSAHAN TINDAKAN DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN DALAM PELAKSANAAN SUBSIDI BUNGA ATAU MARGIN  
*Ahmad Zaky Mubarak*
- ◆ LEGALITAS KEPEMILIKAN ATAS HASIL PENAMBANGAN ASTEROID DI RUANG ANGKASA BERDASARKAN PENGATURAN HUKUM INTERNASIONAL  
*Alya Azalia Permata Sari*
- ◆ PENGAWASAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS) TERHADAP KEPATUHAN PRINSIP SYARIAH PADA BANK SYARIAH  
*Antiek Firdausi Putri*
- ◆ PENOLAKAN PEMERINTAH INDONESIA UNTUK MEMULANGKAN WARGA NEGARA INDONESIA YANG BERGABUNG DENGAN ISIS  
*Christin Lauren Natasya*
- ◆ PERTANGGUNGJAWABAN TUKANG GIGI DALAM PRAKTIK YANG MERUGIKAN KONSUMEN  
*Dzaka Ananda Hidayat*
- ◆ PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI BARANG HASIL LELANG ASET BANK SYARIAH YANG TIDAK DAPAT MENGUASAI BARANG YANG TELAH DIBELINYA MELALUI LELANG OLEH BANK SYARIAH  
*Monza Riviero Harissa*
- ◆ TANGGUNG JAWAB INDONESIA DALAM PENANGANAN COVID-19 MELALUI VAKSIN DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL  
*Muhammad Fardi Sofari*
- ◆ PERSPEKTIF HUKUM PIDANA TERHADAP PENGGUNAAN DINAR-DINAR SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN DI INDONESIA  
*Muhammad Risky Oktavian Akbar*
- ◆ KETIDAKPASTIAN HUKUM SANKSI SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR (STUDI KASUS DI KABUPATEN SIDOARJO)  
*Sultan Herlambang Yoga Pratama*
- ◆ KEDUDUKAN SURAT EDARAN MENTERI DALAM HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
*Wafa Yusdheaputra*

# *Jurist-Diction*

---

Diterbitkan oleh Fakultas Hukum, Universitas Airlangga 4 (empat) kali dalam setahun pada bulan Januari, April, Juli, dan Oktober.

## **Editor in Chief**

Amira Paripurna, S.H., LL.M., Ph.D.

## **Associate Editor**

Dr. Astutik, S.H., M.H.

Zendy Wulan Ayu Widhi Prameswari, S.H., LL.M.

## **Assistant Editor**

Mochamad Kevin Romadhona, S.Sosio.

Khusnul Latifah, S.IIP.

Ajeng Anggraeni, S.Pi.

## **Reviewer**

Dr. Soelistyowati, S.H., M.H.

Dr. Rr. Herini Siti Aisyah, S.H., M.H.

Dr. Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum.

Dr. Zahry Vandawati, S.H., M.H.

Dr. Lanny Ramli, S.H., M.Hum.

Dr. Agung Sujatmiko, S.H., M.H.

## **Alamat Redaksi**

Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya, 60286 Indonesia

Telp. +6231-5023151 / 5023252 Fax. +6231-5020454

Email: [Jurist-Diction@fh.unair.ac.id](mailto:Jurist-Diction@fh.unair.ac.id)

---

Sebelum mengirimkan naskahnya, penulis disarankan untuk terlebih dahulu menyesuaikan dengan GAYA SELINGKUNG jurnal, sebagaimana terdapat di halaman akhir jurnal ini.

---

Printed By: Airlangga University Press. Kampus C Unair, Mulyorejo Surabaya 60115, Indonesia.  
Telp. (031) 5992246, 5992247, Fax. 031 5992248, Email: [aup.unair@gmail.com](mailto:aup.unair@gmail.com)

# *Jurist-Diction*

## DAFTAR ISI

Keabsahan Tindakan Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam Pelaksanaan Subsidi Bunga atau Margin <b>Ahmad Zaky Mubarak</b> .....	1 - 20
Legalitas Kepemilikan Atas Hasil Penambangan Asteroid di Ruang Angkasa Berdasarkan Pengaturan Hukum Internasional <b>Alya Azalia Permata Sari</b> .....	21 - 48
Pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) Terhadap Kepatuhan Prinsip Syariah Pada Bank Syariah <b>Antiek Firdausi Putri</b> .....	49 - 64
Penolakan Pemerintah Indonesia Untuk Memulangkan Warga Negara Indonesia yang Bergabung Dengan ISIS <b>Christin Lauren Natasya</b> .....	65 - 86
Pertanggungjawaban Tukang Gigi Dalam Praktik Yang Merugikan Konsumen <b>Dzaka Ananda Hidayat</b> .....	87 - 102
Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Barang Hasil Lelang Aset Bank Syariah yang Tidak Dapat Menguasai Barang yang telah Dibelinya Melalui Lelang oleh Bank Syariah <b>Monza Riviero Harissa</b> .....	103 - 134
Tanggung Jawab Indonesia dalam Penanganan Covid-19 melalui Vaksinasi ditinjau dari Perspektif Hukum Internasional <b>Muhammad Fardi Sofari</b> .....	135 - 152
Perspektif Hukum Pidana Terhadap Penggunaan Dinar-Dinar sebagai Alat Pembayaran di Indonesia <b>Muhammad Risky Oktavian Akbar</b> .....	153 - 170
Ketidakpastian Hukum Sanksi Sapu Bersih Pungutan Liar (Studi Kasus di Kabupaten Sidoarjo) <b>Sultan Herlambang Yoga Pratama</b> .....	171 - 190
Kedudukan Surat Edaran Menteri Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan <b>Wafa Yusdheaputra</b> .....	191 - 214